



## Pendidikan Antikorupsi Melalui Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar

Afyah Nurtisna<sup>1\*</sup>, Melva Zainil<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Universitas Negeri Padang, Indonesia

Email: [afyahnurtisna878@gmail.com](mailto:afyahnurtisna878@gmail.com)<sup>1</sup>, [melvazainil@fip.unp.ac.id](mailto:melvazainil@fip.unp.ac.id)<sup>2</sup>

Alamat: Jl. Prof. Dr Hamka, Padang, Indonesia

\*Korespondensi penulis: [afyahnurtisna878@gmail.com](mailto:afyahnurtisna878@gmail.com)

**Abstract.** *Anti-corruption education is essential to be introduced from an early age as an effort to build honest, disciplined, and responsible character. Elementary school serves as a fundamental stage to instill these values through the subject of Civics Education (PPKn). This study uses a literature review method by analyzing relevant sources such as journals, books, and official policy documents. The aim is to identify the role of Civics Education in integrating anti-corruption values into elementary education. The findings indicate that Civics Education can serve as an effective medium to foster honesty, care, and responsibility through storytelling, discussions, and role-play methods. Support from teachers, schools, and families, as well as the development of contextual learning media, is needed to make anti-corruption values easier to understand and apply by elementary students.*

**Keywords:** *Anti-corruption education, Civics Education, elementary school, character*

**Abstrak.** Abstrak Pendidikan antikorupsi penting diterapkan sejak dini sebagai upaya membentuk karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Sekolah dasar menjadi fondasi utama dalam menanamkan nilai-nilai tersebut melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menganalisis berbagai literatur yang relevan, seperti jurnal, buku, dan dokumen kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran pembelajaran PPKn dalam mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn dapat menjadi sarana efektif dalam menanamkan nilai kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab melalui metode bercerita, diskusi, dan simulasi peran. Oleh karena itu, di perlukan dukungan guru, sekolah, dan keluarga serta pengembangan media pembelajaran yang kontekstual agar nilai-nilai antikorupsi lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh peserta didik sekolah dasar.

**Kata kunci:** Pendidikan antikorupsi, PPKn, sekolah dasar, karakter

### 1. LATAR BELAKANG

Korupsi menjadi salah satu isu penting yang menghambat kemajuan bangsa. Dampaknya tidak hanya merusak sistem pemerintahan, tetapi juga melemahkan nilai-nilai moral dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Mengatasi korupsi tidak bisa dilakukan hanya dengan penegakan hukum, melainkan juga perlu dilakukan secara preventif melalui jalur pendidikan, terutama sejak usia dini. Sekolah dasar memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada anak sebagai calon penerus bangsa. Melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), peserta didik dapat dikenalkan pada nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian sosial (Perdana et al., 2021).

Pendidikan antikorupsi melalui PPKn di sekolah dasar diharapkan dapat menanamkan kesadaran dan sikap antikorupsi yang menjadi bagian dari rutinitas peserta didik setiap hari.

Maka dari itu, diperlukan upaya untuk mengkaji bagaimana strategi dan pendekatan pembelajaran PPKn dapat diintegrasikan dengan pendidikan antikorupsi secara efektif, serta dukungan apa saja yang dibutuhkan agar implementasinya dapat berjalan optimal di lingkungan sekolah dasar.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka (*literature review*), yakni pendekatan yang mengandalkan penelaahan serta analisis terhadap berbagai referensi yang relevan guna memperoleh data dan informasi yang mendukung kajian topik. Pendekatan ini digunakan untuk menggali konsep, strategi, serta implementasi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PPKn di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku referensi, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan pendidikan yang membahas pendidikan antikorupsi, pendidikan karakter, dan pembelajaran PPKn. Proses analisis dilakukan dengan menerapkan teknik *content analysis*, yang dilakukan dengan mengenali pokok-pokok bahasan penting, mengklasifikasikan ide pokok, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan dalam literatur yang dikaji. Melalui metode ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang efektif untuk mengintegrasikan pembelajaran yang mengandung muatan nilai antikorupsi di tingkat sekolah dasar.

## **3. PEMBAHASAN**

Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan masyarakat dan negara, berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan potensi individu serta mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan (Kusumawati et al., 2023). Dalam lingkup Indonesia, pendidikan tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek akademis, melainkan juga mencakup pembentukan karakter dan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berkontribusi positif dalam masyarakat. Sektor pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan termasuk ketimpangan dalam akses dan mutu yang memerlukan perhatian serius dari lembaga pemerintah serta masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan efektif (Zamhari et al., 2023).

Pendidikan antikorupsi merupakan upaya strategis dalam membangun karakter generasi muda yang berintegritas di Indonesia (Irsyadi & Arifani, 2024). Melalui pendidikan ini, nilai-nilai seperti kejujuran, akuntabilitas, dan integritas ditanamkan sejak dini, sehingga generasi muda dapat memahami dampak negatif dari korupsi dan pentingnya hidup sesuai

dengan prinsip moral. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi tidak hanya melibatkan kurikulum formal, tetapi juga memerlukan dukungan dari keluarga serta masyarakat guna membangun lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran nilai-nilai tersebut (Auliya Tyananda et al., 2025). Dengan demikian, pendidikan antikorupsi menjadi elemen yang tak terpisahkan dalam sistem pendidikan yang berfokus pada terbentuknya masyarakat yang lebih berkeadilan dan transparan di masa yang akan datang.

Integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam materi PPKn di sekolah dasar sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik sejak dini. Penanaman nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dapat dilakukan melalui berbagai metode pembelajaran yang terintegrasi dalam kurikulum. Integrasi ini tidak hanya melibatkan pengajaran formal, tetapi juga pembiasaan nilai dalam aktivitas sehari-hari di sekolah, sehingga peserta didik dapat merasakan langsung pentingnya nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan mereka (Syahwaliana et al., 2025).

Pendidikan karakter dalam PPKn juga berperan penting dalam membentuk sikap antikorupsi. Aspek penting dalam implementasi pendidikan karakter di sekolah meliputi beberapa strategi yang dapat digunakan. Strategi pertama, guru mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam setiap kegiatan pembelajaran di semua mata pelajaran. Strategi kedua, guru menggunakan metode khusus untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Salah satu metode yang efektif adalah dengan menjadi role model atau teladan bagi peserta didik. Strategi ketiga, guru membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai karakter di sekolah. Proses ini melibatkan diskusi dengan peserta didik untuk menentukan aturan dan norma yang akan diterapkan di kelas. Strategi keempat, guru memasang himbauan atau slogan tentang nilai-nilai karakter di kelas atau di seluruh lingkungan sekolah. Misalnya, poster yang mengingatkan pentingnya kejujuran, kerja keras, dan sikap saling menghormati. Strategi kelima, guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang menunjukkan karakter baik. Penghargaan ini bisa berupa pujian, sertifikat, atau hadiah kecil yang diberikan sebagai wujud apresiasi untuk sikap positif yang ditunjukkan oleh peserta didik (Ladiva et al., 2024).

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam kompetensi dasar PPKn, peserta didik dapat belajar untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik (Wajdi et al., 2025). Proses pembelajaran ini harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga peserta didik tidak hanya mengetahui tentang korupsi tetapi juga merasakan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang efektif melalui pendidikan karakter dapat membantu meningkatkan

kesadaran peserta didik tentang pentingnya nilai-nilai antikorupsi dan mendorong mereka untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Fitria et al., 2023).

Penerapan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PPKn juga mendapat perhatian internasional sebagai langkah strategis untuk mencegah korupsi di masa depan. Studi oleh (Salna et al., 2023) menegaskan pentingnya penerapan pendidikan antikorupsi secara konsisten di semua tingkat pendidikan, termasuk sekolah dasar, untuk membentuk generasi muda yang berkarakter antikorupsi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa metode pembelajaran berbasis nilai-nilai etika yang mencakup kejujuran dan tanggung jawab menjadi kunci dalam membangun budaya integritas. Tak hanya itu, kerja sama antara lembaga pendidikan dan masyarakat sipil diyakini dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk penerapan nilai-nilai antikorupsi.

Pentingnya integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam materi PPKn juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang mengarahkan kurikulum pendidikan untuk mencakup aspek kewarganegaraan yang bertanggung jawab (Santoso, 2025). Sebuah studi menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi harus menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam kurikulum, bukan hanya sebagai mata pelajaran terpisah (Hafni et al., 2022). Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman tentang korupsi, tetapi juga diajarkan untuk menjauhinya dan berperilaku secara etis dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diharapkan dapat membangun generasi yang lebih mengerti dan menghargai nilai integritas serta kejujuran dalam masyarakat.

PPKn memiliki peran yang krusial dalam membangun karakter antikorupsi peserta didik melalui pendekatan pembelajaran aktif dan kontekstual. Dalam penelitian yang dilakukan di Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat, ditemukan bahwa metode seperti studi kasus, diskusi kelompok, dan simulasi peradilan semu sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu korupsi. Melalui studi kasus, mereka dapat menganalisis permasalahan korupsi yang relevan dengan lingkungan mereka, sehingga dapat memahami dampak nyata dari tindakan koruptif. Diskusi kelompok memperkuat partisipasi aktif dan pemikiran kritis, sedangkan simulasi peradilan semu menanamkan kesadaran akan konsekuensi hukum dari tindakan korupsi (Hasan, 2025).

Penggunaan media pembelajaran yang menarik dan relevan juga sangat penting dalam proses pembelajaran PPKn (Safitri, 2025). Penelitian menunjukkan bahwa integrasi media yang sesuai dengan konteks kehidupan peserta didik dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar mereka. Misalnya, penggunaan video, artikel berita terkini, atau narasumber dari lembaga anti-korupsi dapat membuat materi lebih hidup dan aplikatif. Hal ini sejalan

dengan rekomendasi untuk mengintegrasikan metode pembelajaran berbasis pengalaman nyata yang tidak hanya mendidik tetapi juga menginspirasi peserta didik untuk berperilaku anti-korupsi dalam kehidupan sehari-hari (Hasan, 2025).

Tantangan dalam penerapan strategi ini sering kali berkaitan dengan keterbatasan waktu dan fasilitas pendukung. Penelitian mencatat bahwa meskipun ada kendala tersebut, strategi pembelajaran yang interaktif dan kontekstual tetap memberikan dampak positif terhadap karakter peserta didik. Oleh karena itu, disarankan agar institusi pendidikan terus mengembangkan kurikulum PPKn dengan memasukkan elemen pendidikan antikorupsi secara lebih mendalam dan menyediakan dukungan fasilitas yang cukup untuk mendukung jalannya proses pembelajaran.

Integrasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dilakukan melalui model Problem-Based Learning (PBL), yaitu dengan menyajikan permasalahan kontekstual yang diselesaikan oleh peserta didik melalui beberapa tahapan seperti orientasi, diskusi dengan guru dan orang tua, diskusi kelompok, presentasi, dan evaluasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi dengan mendorong keterlibatan peserta didik secara aktif dalam menyelesaikan masalah dan berpikir kritis (Angelia et al., 2022). Misalnya, guru memberikan kasus sederhana seperti “teman yang tidak jujur saat membagi tugas piket kelas.” Peserta didik diajak mendiskusikan masalah tersebut secara kelompok, mengidentifikasi nilai yang dilanggar (kejujuran dan tanggung jawab), serta mencari solusi yang adil dan etis. Selama proses, peserta didik dibimbing untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat secara sopan, serta merefleksikan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi. Metode ini mendorong peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran dan menginternalisasi nilai antikorupsi melalui pengalaman langsung.

Peran guru terhadap pembentukan budaya antikorupsi di sekolah dasar sangat krusial, terutama untuk membentuk nilai-nilai integritas kepada peserta didik. Guru berfungsi sebagai teladan yang menunjukkan perilaku jujur dan bertanggung jawab (Masinambow et al., 2025). Melalui pengajaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai antikorupsi, guru dapat membimbing peserta didik untuk memahami pentingnya bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam aktivitas sehari-hari. Penelitian menunjukkan guru bukan sekedar pengajar, melainkan juga sebagai demonstrator dan inovator dalam menerapkan pendidikan antikorupsi, yang sangat penting untuk membentuk karakter peserta didik sejak dini (Kustomo, 2023).

Lingkungan sekolah juga memainkan peranan penting dalam mendukung budaya antikorupsi (M. Siregar, 2024). Sekolah harus menciptakan atmosfer yang mendorong perilaku jujur melalui kebijakan yang adil dan transparan. Misalnya, penghargaan untuk

peserta didik yang menunjukkan perilaku jujur dapat menjadi motivasi tambahan bagi mereka untuk berperilaku baik. Selain itu, penegakan aturan yang konsisten dan adil di sekolah akan memperkuat nilai-nilai yang diajarkan oleh guru. Dengan demikian, lingkungan sekolah yang mendukung akan memperkuat upaya guru dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi.

Keterlibatan orang tua juga merupakan faktor penting pada proses pengembangan karakter peserta didik (Aruan et al., 2021). Kolaborasi antara sekolah dan orang tua dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai antikorupsi. Orang tua diharapkan dapat mendukung upaya sekolah dengan menerapkan prinsip-prinsip kejujuran dan tanggung jawab di rumah. Penelitian membuktikan bahwa keterlibatan orang tua secara langsung dalam pendidikan antikorupsi anak-anak berkontribusi pada hasil yang lebih optimal. Dengan adanya sinergi antara guru, sekolah, dan orang tua, budaya antikorupsi dapat tertanam lebih kuat dalam diri peserta didik.

Secara keseluruhan, pembentukan budaya antikorupsi di tingkat sekolah dasar diperlukan keterlibatan bersama dari banyak pihak. Guru sebagai teladan nilai-nilai antikorupsi, lingkungan sekolah yang mendukung, serta keterlibatan orang tua adalah elemen-elemen kunci dalam menciptakan generasi muda yang berintegritas. Melalui pendekatan ini, diharapkan peserta didik tidak sekedar mengenal konsep antikorupsi melainkan juga menginternalisasikannya di kehidupan sehari-hari mereka.

Tantangan pada penguatan pendidikan antikorupsi di sekolah dasar mencakup beberapa aspek penting. Pertama, minimnya pelatihan bagi guru merupakan salah satu hambatan utama (Santoso, 2025). Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai pendidikan antikorupsi, sehingga pemahaman mereka tentang materi ini masih terbatas. Hal ini berakibat pada ketidakmampuan mereka dalam mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam proses pembelajaran sehari-hari (A. A. Siregar & Chastanti, 2022). Selain itu, terbatasnya bahan ajar tematik juga menjadi masalah, di mana banyak sekolah kekurangan sumber daya dalam menyediakan materi ajar yang relevan serta menarik bagi peserta didik. Kesenjangan pemahaman tentang pendidikan antikorupsi di antara guru dan peserta didik juga menjadi tantangan, di mana tidak semua pihak menyadari pentingnya pendidikan ini dalam membentuk karakter generasi mendatang (M. Siregar, 2024).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama, pengembangan modul tematik yang spesifik untuk pendidikan antikorupsi sangat diperlukan. Modul ini harus dirancang agar sesuai dengan kurikulum dan dapat digunakan oleh semua guru di berbagai mata pelajaran (Nur, 2021). Selain itu, pelatihan berkelanjutan untuk guru juga harus diadakan secara rutin. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman

guru tentang nilai-nilai antikorupsi serta metode pengajaran yang efektif untuk menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik (Nestariana, 2023). Sinergi antara sekolah, pemerintah, serta masyarakat menjadi kunci terciptanya lingkungan yang mendukung pendidikan antikorupsi. Kerjasama ini dapat melibatkan orang tua dan komunitas dalam memberikan dukungan terhadap berbagai program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah.

Implementasi dari solusi-solusi tersebut akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi peserta didik. Dengan adanya modul tematik yang jelas dan pelatihan untuk guru, diharapkan pendidikan antikorupsi dapat diajarkan secara efektif dan menarik. Selain itu, dukungan dari masyarakat akan memperkuat pesan yang ingin disampaikan melalui pendidikan ini. Upaya bersama ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran serta menanamkan integritas sejak dini, sehingga generasi yang akan datang dapat berkembang menjadi individu dengan karakter antikorupsi yang kuat.

#### **4. KESIMPULAN**

Pendidikan memiliki peran sentral untuk membentuk generasi penerus bangsa yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang tangguh dan bermoral. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak sekedar menyampaikan pengetahuan, melainkan juga proses pembentukan nilai dan sikap, termasuk nilai-nilai antikorupsi. Integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam pembelajaran PPKn di sekolah dasar menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan sejak dini. Melalui pendekatan yang menyeluruh baik melalui kurikulum formal, metode pembelajaran aktif seperti Problem-Based Learning (PBL), hingga penanaman nilai melalui pembiasaan dalam kehidupan sekolah peserta didik didorong untuk memahami, menghayati, dan menerapkan prinsip-prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Peran guru sebagai teladan, lingkungan sekolah yang kondusif, serta keterlibatan aktif orang tua menjadi pilar penting dalam mendukung upaya ini. Dengan membiasakan peserta didik untuk berpikir kritis dan reflektif terhadap tindakan yang mereka ambil, pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi materi ajar, tetapi juga menjadi pengalaman hidup yang bermakna bagi peserta didik.

Namun, upaya ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan pelatihan guru mengenai pendidikan antikorupsi, kurangnya bahan ajar tematik yang menarik, serta kesenjangan pemahaman antara guru dan peserta didik menjadi hambatan yang perlu segera diatasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, mulai dari penyediaan pelatihan berkelanjutan bagi guru, pengembangan modul pembelajaran yang

kontekstual dan menyenangkan, hingga pelibatan masyarakat dan orang tua dalam proses pendidikan karakter di sekolah. Kolaborasi ini akan memperkuat efektivitas implementasi pendidikan antikorupsi serta memastikan bahwa nilai-nilai tersebut benar-benar tertanam dalam diri peserta didik. Dengan adanya dukungan menyeluruh dan pendekatan pembelajaran yang relevan, diharapkan sekolah dasar dapat menjadi tempat yang subur untuk menumbuhkan budaya antikorupsi, sehingga kelak lahir generasi yang bukan hanya cerdas, melainkan juga berintegritas tinggi serta siap membangun bangsa yang adil, jujur, dan bermartabat..

## **DAFTAR REFERENSI**

- Angelia, I., Ananda, A., & Montessori, M. (2022). Development of problem-based learning model for corruption prevention in improving anti-corruption attitude in citizenship learning health certificate. *Linguistics and Culture Review*, 465–484.
- Aruan, Y., Tampubolon, M., & Sihotang, H. (2021). Peran Orang Tua Dan Peran Guru Terhadap Pendidikan Karakter. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 1–12.
- Auliya Tyananda, B., Dwi Prayoga, R., Ester, T., Fauzil Adhim, M., Nur Adella, A., Hafizah, N., Maiza Azzahra, D., Shandefi, P., Zahrani, M., Lutviana Fadila, E., Adelia Nurahmi, N., Studi Farmasi, P., MIPA dan Kesehatan, F., & Tuanku Tambusari, J. (2025). Pendidikan Antikorupsi sebagai Upaya Membangun Generasi Berintegritas. 104–113. <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i1.161>
- Fitria, D., Jamaludin, U., & Bahrudin, F. A. (2023). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sebagai Sikap Nilai-Nilai Anti Korupsi. *Jurnal Genta Mulia*, 14(2).
- Hafni, N., Kuntorini, D., Rizki, A., & Satria, O. (2022). Building Capacity dalam Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 10(2), 459–471.
- Hasan, R. (2025). Strategi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Anti Korupsi di Kalangan Mahasiswa. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 13(1), 44–53.
- Irsyadi, M. H., & Arifani, K. B. (2024). Pengaruh Pendidikan Anti-Korupsi Terhadap Perilaku Generasi Muda Di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(04), 306–316.
- Kustomo, K. (2023). Peran Guru PPKn Dalam Menumbuhkan Budaya Antikorupsi di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(1), 424–431.
- Kusumawati, I., Lestari, N. C., Sihombing, C., Purnawanti, F., Soemarsono, D. W. P., Kamadi, L., Latuheru, R. V., & Hanafi, S. (2023). *Pengantar Pendidikan*. CV Rey Media Grafika.

- Ladiva, H. B., Arzfi, B. P., & Putera, R. F. (2024). Implementasi Pendidikan Karakter Di Sd Negeri 33 Sawahan. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 151–162.
- Masinambow, C. J. R., Wakerkwa, T., & Jacobus, S. (2025). Peran Guru Sebagai Teladan Dalam Pendidikan Karakter Di Sulawesi Utara. *Academy of Education Journal*, 16(1), 37–47.
- Nestariana, N. (2023). Pendidikan anti korupsi pada jenjang sekolah dasar. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(01), 28–31.
- Nur, S. M. (2021). Penerapan pendidikan anti korupsi kepada siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2), 111–112.
- Perdana, D. R., Adha, M. M., & Ardiansyah, N. (2021). Model dan strategi penanaman nilai-nilai antikorupsi di sekolah dasar. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 8(01), 21–31.
- Safitri, Y. (2025). Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Budaya dalam Pendidikan Pancasila. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar Indonesia*, 4(2), 84–96.
- Salna, I., Akhiriyah, A. F., & Akhiriyah, S. (2023). A M I Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anak Bangsa (Vol. 1, Issue 1). <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/ami>
- Santoso, A. (2025). Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kurikulum Merdeka (Studi Dinas Pendidikan Kordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan).
- Siregar, A. A., & Chastanti, I. (2022). Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 9(1), 13–22.
- Siregar, M. (2024a). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di SD. *Analysis*, 2(2), 276–284.
- Siregar, M. (2024b). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di SD. *Analysis*, 2(2), 276–284.
- Syahwaliana, K., Habib, T. A., Shofiyah, S. N. A., & Oki, S. (2025). Integrasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Civic Disposition Melalui Pendidikan Pancasila: Systematic Literature Review. *Jurnal Kewarganegaraan*, 22(1), 76–88.
- Wajdi, F., Astuti, E. R. W., Achmad, F. S., Suanto, S., Mashita, M., Halimah, L., Nu'man, M. H., Subandi, Y., Keraf, F. M. P., & Hamson, Z. (2025). *Kapita Selektta Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*.
- Zamhari, Z., Noviani, D., & Zainuddin, Z. (2023). Perkembangan Pendidikan di Indonesia. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 1(5), 1–10.